

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Taliban kembali menguasai Afghanistan pada tahun 2021 setelah invasi yang dilakukan Amerika Serikat. Berkuasanya Taliban di Afghanistan memunculkan berbagai permasalahan yang dialami oleh Afghanistan yang salah satunya adanya opium di Afghanistan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat Afghanistan menggantungkan hidupnya pada budidaya opium. Tahun 2022 Taliban kembali menetapkan kebijakan pelarangan opium di Afghanistan. Kebijakan larangan opium menyebabkan krisis kemanusiaan yang terjadi di Afghanistan semakin meningkat.

Kebijakan larangan opium menjadi langkah strategis yang dilakukan Taliban namun juga sebuah keputusan berdasarkan pada analisis rasional untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Keputusan tersebut didasarkan pada rasionalitas oleh beberapa faktor. Pertama, Taliban merupakan rezim islam. Afghanistan di bawah rezim Taliban memiliki pemikiran islam yang kuat dan menginginkan institusi negara ditegakkan berdasarkan hukum Islam.

Taliban mempunyai tujuan untuk menerapkan interpretasi mengenai negara Islam dan penegakan hukum Islam di Afghanistan sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam, segala hal yang dianggap dapat merusak kesehatan secara jiwa dan akal individu maka diharamkan. Narkoba dapat merusak moral individu yang dapat melanggar norma – norma dalam tatanan masyarakat baik secara psikis, sosial, ataupun ekonomi.

Namun Taliban turut mendapatkan keuntungan dari penanaman narkoba. Taliban mengenakan pajak kepada para petani sebesar 6% atau sekitar US\$ 14,5 juta atas nilai di tingkat petani opium. Selain itu Taliban memberikan keamanan bagi para petani yang menanam opium dan Taliban mengenakan pajak kepada para penyelundup narkoba dan mengenakan pajak pada laboratorium heroin. Sehingga pajak untuk pendapatan dari produksi dan perdagangan opium menghasilkan US\$113 juta.

Kedua, Kebijakan larangan opium yang Taliban terapkan juga mengakibatkan banyaknya pengungsi serta menciptakan krisis yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan perekonomian di Afghanistan. Adanya kebijakan tersebut digunakan Taliban untuk kembali menarik bantuan internasional. PBB pada tahun 2022 mengajukan permohonan kemanusiaan untuk Afghanistan untuk meringankan situasi kemanusiaan yang ada di wilayah Afghanistan dengan nominal sebesar US\$4,4 miliar, namun nominal tersebut hanya menghasilkan 54% dari dana yang diajukan pada konferensi yang diadakan bersama Inggris sebesar US\$2,4 miliar.

Kebijakan yang ditetapkan Taliban mengakibatkan menurunnya perekonomian terkhusus masyarakat pedesaan yang bermatapencahariaan sebagai petani opium, kondisi tersebut mendorong kembali adanya bantuan internasional PBB. Pada tahun 2023, PBB memberikan bantuan tunai sebesar US\$1 miliar untuk mendanai bantuan kemanusiaan di Afghanistan. Selain bantuan finansial, terdapat bantuan melalui program pengembangan alternatif untuk mendukung pengalihan selain budidaya opium.

4.2 Saran

Kebijakan yang ditetapkan oleh Taliban menghasilkan berbagai macam bentuk bantuan internasional untuk Afghanistan. Sehingga seiring berjalannya waktu akan memberikan perubahan yang berasal dari pertumbuhan pada sektor ekonomi yang baik dan menghasilkan peluang kerja yang bermatapencaharian yang sah menurut Islam. Penelitian ini berfokus pada alasan dibalik ditetapkan kebijakan yang dikeluarkan Taliban. Untuk penelitian lebih lanjut disarankan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat dari adanya kebijakan larangan opium oleh Taliban. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti berikutnya dalam menganalisis kasus yang serupa di negara lain.